



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIBOWO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 186793

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

735.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/90 m2 di BALANGAN, WARISAN Rp. 380.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/78 m2 di BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

137.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

3.400.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	371.308.956
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.246.708.956
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.246.708.956

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.